



PERUBAHAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2024



SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono 43. Telp (0274) 540650 Faks (0274) 540651
setwan.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di samping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Juni 2024
Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta

Basuki Hari Saksono, S.H.
NIP. 196411111990031013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2024. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2024 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 menyesuaikan dengan Surat Edaran Pj. Walikota Yogyakarta Nomor 100.3.4.3/2414/SE/2024 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1.3. MAKSUD & TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan tujuan :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024,
2. Agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan,
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024,

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II
- 2.3. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah
- 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi dan Misi kepala Daerah

Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah :

“MENEKUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN
PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK
KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI
KEISTIMEWAAN.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah :
“Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD”.

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.
2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara menyeluruh.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.
4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun Sasaran yang akan dicapai : **“Meningkatnya Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD”.**

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.
2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta hasil review renstra tahun 2024 dengan tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indikator Sasaran :											
a	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD											
	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD			78.2	79.5*	80*	81*	80.63	79.60	79.5	80	
b	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD											
	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat			A	A	A	A	A	A	A	A	
2	Indikator Program :											
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD											
	Persentase produk hukum yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD			61.67	75*	76*	77*	-	85.24	75	76	
	Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi			100%	100%	100%	100%	-	97.44	100%	100%	

* Hasil review renstra Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang persidangan dan perundang-undangan.
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, serta kerjasama dan penyerapan aspirasi kepada DPRD.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023 berjumlah 107 orang pegawai. Berikut gambaran struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD;
2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan;
3. 2 (dua) orang Kepala Sub. Bagian

Kepala Bagian Administrasi Umum , terbagi dalam 2 sub bagian dan 1 Ketua Tim Kerja :

- a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Ka. Sub Bagian Keuangan
- c. Ketua Tim Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terbagi dalam 3 sub bagian :

- a. Ketua Tim Kajian Perundang Undangan
- b. Ketua Tim Persidangan dan Risalah
- c. Ketua Tim Humas Protokol dan Publikasi

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terbagi dalam 3 sub bagian :

- a. Ketua Tim Fasilitasi Penganggaran
- b. Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
- c. Ketua Tim Kerjasama dan Aspirasi
4. Staf ASN berjumlah 27 orang
5. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 6 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)

Selain pegawai baik ASN maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga didukung sumber daya manusia antara lain :

- a. Tenaga Ahli Fraksi 6 orang
- b. Tenaga Teknis 31 orang
- c. Tenaga Outsourcing (Tenaga Informasi dan Teknologi 3 orang, Driver Pimpinan 3 orang, Cleaning Service 10 orang dan Security 12 orang)

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

- a. Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 43 Yogyakarta.

1. Gedung Sekretariat DPRD
2. Gedung DPRD

Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m², terdiri dari tiga lantai terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai 1
 - Ruang Lobby
 - Ruang Rapat Dewan
 - Ruang Fraksi
 - Tempat Parkir
 - WC/Urinoir
- Lantai 2
 - Ruang Operator
 - Ruang Pimpinan DPRD
 - Ruang Komisi
 - Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 - Ruang Badan Kehormatan
 - Ruang Rapat Dewan
 - Mushola
 - WC/Urinoir

- Lantai 3
 - Ruang Rapat Paripurna
 - Ruang Sekretaris DPRD
 - Ruang Bagian Administrasi Umum
 - Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - Ruang Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD
 - WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2024 terbagi Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

- Kendaraan roda 4 : 16 unit
- Kendaraan roda 2 : 14 unit

2. Sarana Komunikasi

Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.

3. Sarana Pendukung Lainnya

Genset, CCTV, TV Wall, TV Smartboard, Televisi, APAR, Pompa Hydrant, Stand Thermogun

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	78.5 Skala 0-100
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	35.099.249.045,00	A Nilai	22.954.702.168,00	A Nilai	16.484.464.899,00	0,00%	71,81%					Bagian Administrasi Umum	
			Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan = Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					Bagian Administrasi Umum	
			Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan = Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100%	100,00 %	0,00	87,50 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	87,50	0,00	87,50%	0,00%					Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	
		PerencanaanPenganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100.080.194,00		48.389.830,00		28.537.500,00		58,97%						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		15.460.572,00	93,98%	14.520.000,00	93,98%	5.440.000,00	100,00%	37,47%						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		93,98%		93,98%		100,00%							

	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00		6.342.000,00	50,00%	3.171.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00		0,00		6.342.000,00	21,44%	1.360.000,00	21,44%	0,00	100,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		21,44%		21,44%		100,00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00		0,00		5.122.830,00	20,36%	1.042.830,00	20,36%	1.042.500,00	100,00%	99,97%						
		Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		20,36%		20,36%		100,00%							
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0,00		0,00		5.122.830,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0,00		0,00		59.849.962,00	46,51%	27.836.000,00	46,51%	22.055.000,00	100,00%	79,23%						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		24 Laporan		46,51%		46,51%		100,00%							
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00		1.840.000,00	25,00%	460.000,00	25,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5.909.343.786,00		4.493.055.078,00		2.798.490.532,00		62,28%						
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00		0,00		5.877.266.000,00	76,95%	4.479.255.078,00	76,95%	2.784.936.532,00	100,00%	62,17%						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan		76,95%		76,95%		100,00%							
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		16.560.000,00	42,00%	6.900.000,00	42,00%	6.654.000,00	100,00%	96,43%						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		42,00%		42,00%		100,00%							
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00		0,00		5.520.000,00	50,00%	2.760.000,00	50,00%	2.760.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		0,00		920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00		0,00		1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	100,00%	100,00%						

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	4 Paket		0,00%		52,52%		0,00%							
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00	0,00		89.870.000,00	44,00%	39.037.325,00	44,00%	31.078.250,00	100,00%	79,61%						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0 paket	3 paket		44,00%		44,00%		100,00%							
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	0,00		439.804.000,00	38,50%	167.326.998,00	38,00%	18.076.750,00	98,70%	10,80%						
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	2 paket		0,00%		38,00%		0,00%							
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00	0,00		52.710.000,00	51,00%	26.355.000,00	50,00%	21.360.000,00	98,04%	81,05%						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		51,00%		50,00%		98,04%							
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00	0,00		415.016.000,00	44,00%	181.280.000,00	43,97%	140.881.118,00	99,93%	77,71%						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	76 laporan		0,00%		43,97%		0,00%							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.824.742.125,00		947.808.125,00		742.016.558,00		78,29%						
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00	0,00		10.100.000,00	65,00%	6.500.000,00	65,00%	6.060.500,00	100,00%	93,24%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0 laporan	60 laporan		65,00%		65,00%		100,00%							
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0,00	0,00		325.800.000,00	61,50%	198.900.000,00	61,50%	190.061.824,00	100,00%	95,56%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	25 laporan		0,00%		61,50%		0,00%							
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00	0,00		1.488.842.125,00	50,00%	742.408.125,00	50,00%	545.894.234,00	100,00%	73,53%						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	38 laporan		0,00%		50,00%		0,00%							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.722.534.000,00		1.751.841.500,00		1.439.466.015,00		82,17%						
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00	0,00		365.370.000,00	50,01%	182.559.998,00	50,01%	118.316.501,00	100,00%	64,81%						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0 unit	4 unit		0,00%		50,01%		0,00%							
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00	0,00		588.698.000,00	52,00%	301.361.502,00	52,00%	142.088.044,00	100,00%	47,15%						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit	0 unit	26 unit		0,00%		52,00%		0,00%							
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	0,00		221.000.000,00	46,00%	101.000.000,00	46,00%	90.237.050,00	100,00%	89,34%						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0 unit	48 unit		0,00%		46,00%		0,00%							
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00	0,00		1.547.466.000,00	78,00%	1.166.920.000,00	76,21%	1.088.824.420,00	97,71%	93,31%						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	1 unit		0,00%		76,21%		0,00%							

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										21.991.577.000,00		14.522.241.550,00		10.665.641.850,00		73.44%					
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			0,00		0,00		21.644.747.000,00	66,00%	14.180.381.550,00	66,00%	10.665.476.850,00	100,00%	75,21%							
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		40 Orang/Bulan		66,00%		66,00%		100,00%								
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			0,00		0,00		302.770.000,00	99,50%	300.060.000,00	99,50%	165.000,00	100,00%	0,05%							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	0 paket		0 paket		1 paket		0,00%		99,50%		0,00%								
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			0,00		0,00		44.060.000,00	95,00%	41.800.000,00	5,00%	0,00	5,26%	0,00%							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0 orang		0 orang		40 orang		95,00%		5,00%		5,26%								
Layanan Administrasi DPRD										1.267.624.250,00		628.222.917,00		491.925.476,00		78.3%					
1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			0,00		0,00		43.872.000,00	53,00%	22.786.000,00	53,00%	18.705.000,00	100,00%	82,09%							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		53,00%		53,00%		100,00%								
2	Fasilitasi Fraksi DPRD			0,00		0,00		455.292.000,00	51,01%	227.646.000,00	51,01%	190.921.000,00	100,00%	83,87%							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0 laporan		0 laporan		120 laporan		0,00%		51,01%		0,00%								
3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			0,00		0,00		482.720.250,00	55,08%	257.559.250,00	55,08%	179.404.000,00	100,00%	69,66%							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0 laporan		0 laporan		31 laporan		0,00%		55,01%		0,00%								
4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			0,00		0,00		285.740.000,00	43,00%	120.231.667,00	43,00%	102.895.476,00	100,00%	85,58%							
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	0 paket		0 paket		8 paket		0,00%		43,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja													97,36%	72,61%							
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sedang							

	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan= Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	36.037.391.750,00	100 %	26.817.472.753,00	100 %	14.072.052.870,00	100,00%	52,47%					Bagian Persidangan dan Perundang Undangan
		Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan	Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang diselesaikan = Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%					Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

				diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%																			
			Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan	Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan = Rata-rata persentase kepesertaan Bimtek Anggota Dewan dalam 1 tahun	100,00 %	0,00	94,69 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	94.69	0,00	94,69%	0,00%						Bagian Administrasi Umum	
			Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD	Rerata Persentase Kepuasan Masyarakat dari Website Sekretariat DPRD, Website DPRD, dan Medsos DPRD	67,67 %	0,00	85,24 %	0,00	63,67 %	0,00	63.67	0,00	85.24	0,00	133,88%	0,00%						Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	
			Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	Rata-rata persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	100,00 %	0,00	97,44 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	97.44	0,00	97,44%	0,00%						Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
			Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan	Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan = Jumlah layanan administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00%	0,00%						Bagian Administrasi Umum	
			Peningkatan Kapasitas DPRD							7.458.213.000,00	4.519.170.250,00	1.728.056.179,00	38.24%										

	1	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			0,00	0,00		2.605.608.000,00	61,01%	1.574.809.000,00	61,01%	845.030.000,00	100,00%	53,66%							
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD		0 dokumen	0 dokumen	18 dokumen			0,00%		61,01%		0,00%								
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						8.195.252.000,00		8.119.672.000,00		3.217.166.467,00		39,62%							
	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			0,00	0,00		1.565.982.000,00	96,50%	1.506.152.000,00	60,51%	355.512.877,00	62,70%	23,60%							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen			0,00%		60,53%		0,00%								
	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			0,00	0,00		5.146.920.000,00	99,83%	5.131.170.000,00	89,65%	2.568.797.590,00	89,80%	50,06%							
		Jumlah Dokumen produk hukum		0 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen			0,00%		89,66%		0,00%								
	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			0,00	0,00		963.600.000,00	99,99%	963.600.000,00	87,83%	287.756.000,00	87,84%	29,86%							
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undang		0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen			0,00%		87,84%		0,00%								
	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			0,00	0,00		518.750.000,00	100,01%	518.750.000,00	89,39%	5.100.000,00	89,38%	0,98%							
		jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan naskah akademik		0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen			0,00%		89,39%		0,00%								
		Pembahasan Kebijakan Anggaran						2.843.199.000,00		735.172.000,00		535.433.500,00		72,83%							
	1	Pembahasan KUA dan PPAS			0,00	0,00		541.236.000,00	72,04%	388.898.000,00	72,04%	309.098.200,00	100,00%	79,48%							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen			0,00%		72,04%		0,00%								
	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			0,00	0,00		407.177.000,00	1,00%	1.150.000,00	0,05%	575.000,00	5,00%	50,00%							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		0 bulan	0 bulan	4 bulan			0,00%		0,05%		0,00%								
	3	Pembahasan APBD			0,00	0,00		836.196.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%								
	4	Pembahasan APBD Perubahan			0,00	0,00		706.366.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%								
	5	Pembahasan Laporan Semester			0,00	0,00		5.950.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%								
	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			0,00	0,00		346.274.000,00	99,67%	345.124.000,00	98,51%	225.760.300,00	98,84%	65,41%							
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		98,51%		0,00%								
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						7.129.193.000,00		6.505.637.000,00		4.185.519.394,00		64,34%							
	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			0,00	0,00		1.235.661.500,00	88,01%	1.082.867.000,00	75,55%	620.666.740,00	85,84%	57,32%							
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan			0,00%		86,35%		0,00%								
	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			0,00	0,00		1.141.107.500,00	87,99%	996.087.000,00	75,30%	604.791.240,00	85,58%	60,72%							
		Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan		0 laporan	0 laporan	12 laporan			0,00%		86,11%		0,00%								

			Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00%		80,92%		0,00%								
	2	Pengawasan Kode Etik DPRD			0,00		0,00	353.575.000,00	98,95%	348.175.000,00	76,99%	82.858.560,00	77,81%	23,80%							
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		0 laporan	0 laporan	12 laporan		0,00%		77,92%		0,00%								
Pembahasan Kerja Sama Daerah								457.697.000,00		245.078.000,00		101.852.380,00		41,56%							
	1	Fasilitasi/Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah			0,00		0,00	356.817.000,00	66,96%	238.278.000,00	33,08%	101.852.380,00	49,40%	42,75%							
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen		0,00%		33,08%		0,00%								
	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			0,00		0,00	100.880.000,00	7,00%	6.800.000,00	7,00%	0,00	100,00%	0,00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00%		7,00%		0,00%								
Fasilitasi Tugas DPRD								5.755.741.500,00		3.975.490.503,00		2.341.323.295,00		58,89%							
	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			0,00		0,00	605.879.000,00	98,51%	593.279.000,00	98,51%	258.088.000,00	100,00%	43,50%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00%		98,51%		0,00%								
	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			0,00		0,00	390.243.500,00	100,00%	390.243.500,00	50,00%	345.000,00	50,00%	0,09%							
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan		0,00%		50,00%		0,00%								
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			0,00		0,00	2.449.770.000,00	69,44%	1.686.597.000,00	69,44%	1.123.872.544,00	100,00%	66,64%							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		0,00%		69,44%		0,00%								
	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			0,00		0,00	2.309.849.000,00	57,00%	1.305.371.003,00	56,43%	959.017.751,00	99,00%	73,47%							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00%		56,43%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja													82,20%	48,55%							
Predikat kinerja													Tinggi	Sangat Rendah							
Total anggaran dari seluruh program								71.136.640.795,00		49.772.174.921,00		30.556.517.769,00									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)													90,77%	61,39%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)													Sangat Tinggi	Rendah							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ada di propemperda; 2. Komitmen DPRD untuk membahas dan menyelesaikan beberapa raperda dalam propemperda 2024 di semester pertama; 3. Triwulan II sudah 7 raperda dalam tahapan pembahasan antara DPRD dan Walikota; (Raperda Perubahan tentang Pengelolaan Sampah; Raperda Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Jogja; Raperda Pencabutan Perda LPMK; Raperda RPJPD Kota Yogyakarta; Raperda Air Limbah; Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum; Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan); 4. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Biro Hukum Setda DIY dan Kanwil Kemenkumham DIY terkait tahapan pembahasan raperda; 5. Komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD; 6. Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi.																				
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur; 2. Dalam tahap pembahasan raperda ada tahapan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham DIY. Dalam tahapan ini terkadang membutuhkan waktu yang lama, karena dimungkinkan rekomendasi hasil harmonisasi berupa penyempurnaan dari draft raperda; 3. Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana sesuai agenda yang sudah di tetapkan; 4. Untuk penatausahaan keuangan masih menggunakan 2 aplikasi baik dari SIPKD maupun SIPD Kemendagri																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																				

2.3 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- b. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.
- c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis,
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD,
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah,
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan,
4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial.

2.5 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan DPRD Kota Yogyakarta.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola,
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian,
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi,
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional,
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial,
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi,
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD,
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan,
10. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
11. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Sekretariat DPRD naik dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang semula sebesar Rp. 71.136.640.795,- pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 menjadi Rp. 73.656.604.795,- ada kenaikan sebesar Rp. 2.519.964.000,-. Hal ini disebabkan karena pada program / kegiatan / sub kegiatan internal Sekretariat DPRD ada penambahan sub kegiatan baru yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada rincian belanja modal peralatan dan mesin dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD. Selain kenaikan pada program / kegiatan / sub kegiatan internal Sekretariat DPRD, ada juga kenaikan pada program / kegiatan / sub kegiatan eksternal Sekretariat DPRD yang signifikan yaitu pada sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD.

Walaupun secara keseluruhan pagu indikatif Sekretariat DPRD mengalami kenaikan, tetapi untuk beberapa kegiatan khususnya pada program / kegiatan / sub kegiatan eksternal Sekretariat DPRD yang memfasilitasi kegiatan DPRD ada pengurangan komponen belanja yaitu pada volume belanja makan minum rapat, belanja narasumber, belanja perjalanan dinas, dan belanja bantuan transport (RDPU / dialog warga / uji publik).

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini pada anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 35.099.249.045,- pada anggaran perubahan tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 36.728.734.545,-. Ada penambahan anggaran sebesar Rp. 1.629.485.500,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 100.080.194,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.5.909.343.786,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp.6.111.028.786,- mengalami kenaikan sebesar Rp.201.685.000,-. Kenaikan terjadi pada belanja gaji dan tunjangan ASN,
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.13.800.000,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.3.542.000,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.1.266.005.690,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp.1.274.305.690,- mengalami kenaikan sebesar Rp.8.300.000,-. Kenaikan terjadi pada penambahan volume belanja kertas NCR, belanja modal pengadaan tangga, dan belanja modal pengadaan alat pengatur suhu dan kelembapan ruang arsip. Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga target indikator juga ikut bertambah seiring dengan penambahan anggaran belanja modal tersebut di atas, yang semula 3 paket menjadi 5 paket,
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada anggaran murni tidak ada, tetapi untuk perubahan Renja mengakibatkan sebesar Rp.729.030.500,-. Pada perubahan ada belanja modal pengadaan AC 1PK, belanja modal pengadaan videotron/TV home teater (di lobby depan), belanja modal pengadaan E-Notula (untuk memfasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD), belanja modal pengadaan laptop untuk DPRD periode 2024–2029, belanja modal pengadaan laptop untuk JDIH, belanja modal pengadaan printer untuk JDIH.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.1.824.742.125,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp.1.969.862.125,- mengalami kenaikan sebesar Rp.145.120.000,-. Kenaikan terjadi pada volume belanja tagihan listrik, volume belanja retribusi kebersihan, dan belanja pembuatan company profile (video profil). Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor target indikator juga ikut bertambah seiring dengan penambahan belanja tersebut di atas yang semula 38 laporan menjadi 39 laporan,

- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.2.722.534.000,- pada perubahan Renja menjadi sebesar Rp.3.055.034.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 332.500.000,-. Penambahan terjadi pada belanja pemeliharaan perbaikan / renovasi interior ruang fraksi PPP, belanja pemeliharaan ornamen ukiran jati, belanja pemeliharaan jasa konsultan perencanaan ruang fraksi PPP, belanja pemeliharaan jasa konsultan pengawasan ruang fraksi PPP, dan belanja modal pembuatan gazebo kayu jati minimalis.
- 9) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp.21.991.577.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp.21.989.327.000,-. Ada pengurangan belanja yaitu pada belanja bahan percontohan pakaian dinas DPRD.
- 10) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 1.267.624.250,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 1.482.724.250,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 215.100.000,-. Penambahan terjadi pada belanja modal pengadaan rak server, belanja modal pengadaan mebelair meja kursi jati ruang lobby pimpinan sisi Selatan, belanja modal pengadaan mebelair meja kursi jati ruang podcast, belanja modal pengadaan mebelair meja kursi jati ruang lobby pimpinan sisi utara. Dan belanja modal pengadaan vacum cleaner. Pada sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD target indikator juga ikut bertambah seiring dengan penambahan anggaran belanja modal tersebut di atas, yang semula 8 paket menjadi 11 paket

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini pada anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 36.037.391.750,- pada anggaran perubahan tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 36.927.870.250,-. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp. 890.478.500,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 8.195.252.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 8.324.582.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 129.330.000,-. Kenaikan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas luar daerah,
- 2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran. Anggaran murni sebesar Rp. 2.843.199.000,- pada perubahan menjadi sebesar

Rp. 2.747.567.500,- mengalami penurunan sebesar Rp. 95.631.500,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber, belanja bantuan transport, dan belanja perjalanan dinas luar daerah,

3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Anggaran murni sebesar Rp. 7.129.193.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 7.088.993.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 40.200.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber, dan belanja bantuan transport,

4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 7.458.213.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 8.521.213.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.063.000.000,-. Penambahan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman tamu, dan belanja jasa iklan / reklame, film, dan pemotretan. Adapun komponen belanja jasa iklan / reklame, film dan pemotretan yang bertambah volumenya sebagai berikut:

- Publikasi/Sosialisasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum di Media Cetak (untuk satu halaman penuh di media cetak, jumlah 6 kali karena mengikuti jumlah pansus yang menjadi Perda),
- Advertorial di Media Cetak (untuk mencitrakan eksistensi Dewan dengan mengangkat satu isu aktual dan mendasar dengan ukuran 1/8 halaman berwarna pada media cetak halaman depan bawah, jumlah 20 kali karena sekali tayang untuk 2 orang Dewan),
- Publikasi Kegiatan DPRD di Media Cetak (untuk penyajian kegiatan dan profil pribadi anggota DPRD 40 orang dengan ukuran 4 kolom kali 200 mm 1/8 halaman fc + banner di media cetak),
- Mimbar Alat Kelengkapan (untuk penyajian kegiatan hasil kinerja alat kelengkapan Dewan (9 alkep + 3 orang pimpinan) dengan ukuran 7 kolom kali 270 mm 1/2 halaman di media cetak),
- Dewan Menyapa (untuk life talkshow streaming di media online durasi 60 menit di titik wilayah kota Yogyakarta, jumlah 3 kali karena jumlah pimpinan 3 orang yang berdialog dengan masyarakat secara life streaming),
- Obrolan Tugu Jogja (untuk life mengangkat tema strategis yang berlokasi di tugu jogja, jumlah 6 kali karena komisi 4 kali masing-masing 1, Banggar & Banmus, BK & Bapemperda),

- Podcast DPRD (untuk anggota dan pimpinan dalam rangka mengangkat isu strategis pada publikasi media sosial DPRD (Instagram, Youtube, dll), jumlah 8 kali karena untuk 8 alat kelengkapan (4 Komisi, 4 Badan) dan untuk pimpinan hadir selaku moderator),
 - Publikasi Videotron (untuk pemasangan media luar ruang dengan materi kegiatan anggota dan pimpinan DPRD tayang selama 1 bulan dengan durasi 60 detik, jumlah 4 videotron baliho karena 4 komisi).
- 5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. Anggaran murni sebesar Rp. 3.509.556.250,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 3.396.956.250,- mengalami penurunan sebesar Rp. 112.600.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber (moderator), belanja bantuan transport dialog warga / RDPU, dan publikasi / pengumuman agenda Reses DPRD,
 - 6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 688.540.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 653.240.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 35.300.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber, dan belanja bantuan transport (dialog warga, sarasehan)
 - 7) Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 457.697.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 455.777.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 1.920.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat,
 - 8) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 5.755.741.500,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 5.739.541.500,- mengalami penurunan sebesar Rp. 16.200.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat (evaluasi kinerja DPRD dan rapat pimpinan).

Secara rinci uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Fisik		Target Keuangan		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Sekretariat DPRD				71,136,640,795.00	73,656,604,795.00	2,519,964,000.00	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				35,099,249,045.00	36,728,734,545.00	1,629,485,500.00	
SEKRETARIAT DPRD				35,099,249,045.00	36,728,734,545.00	1,629,485,500.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD	A Nilai	A Nilai	35,099,249,045.00	36,728,734,545.00	1,629,485,500.00	
	Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	100%	100%				
	Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	100%	100%				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai	33 Dokumen	33 Dokumen	100,080,194.00	100,080,194.00	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	15,460,572.00	15,460,572.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,342,000.00	6,342,000.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,342,000.00	6,342,000.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,122,830.00	5,122,830.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,122,830.00	5,122,830.00	-	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Fisik		Target Keuangan		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	24 Laporan	59,849,962.00	59,849,962.00	-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1,840,000.00	1,840,000.00	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai	23 Laporan	23 Laporan	5,909,343,786.00	6,111,028,786.00	201,685,000.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang / Bulan	45 Orang / Bulan	5,877,266,000.00	6,078,951,000.00	201,685,000.00	Penambahan belanja gaji dan tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	16,560,000.00	16,560,000.00	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5,520,000.00	5,520,000.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	920,000.00	920,000.00	-	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,840,000.00	1,840,000.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5,520,000.00	5,520,000.00	-	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Fisik		Target Keuangan		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1,717,786.00	1,717,786.00	-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD	17 Laporan	17 Laporan	13,800,000.00	13,800,000.00	-	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,380,000.00	1,380,000.00	-	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,380,000.00	1,380,000.00	-	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,380,000.00	1,380,000.00	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4,140,000.00	4,140,000.00	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4,140,000.00	4,140,000.00	-	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD							
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,380,000.00	1,380,000.00	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,542,000.00	3,542,000.00	-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	3,542,000.00	3,542,000.00	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai	12 Laporan	12 Laporan	1,266,005,690.00	1,274,305,690.00	8,300,000.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	54,954,800.00	54,954,800.00	-	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Fisik		Target Keuangan		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	213,650,890.00	213,650,890.00	-	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	89,870,000.00	94,370,000.00	4,500,000.00	Penambahan belanja modal pengadaan tangga dan belanja modal pengadaan alat pengatur suhu dan kelembapan ruang arsip
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	439,804,000.00	443,604,000.00	3,800,000.00	Penambahan belanja kertas NCR
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	52,710,000.00	52,710,000.00	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Laporan	77 Laporan	415,016,000.00	415,016,000.00	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	-	5 Laporan	-	729,030,500.00	729,030,500.00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	55 Unit	-	729,030,500.00	729,030,500.00	Penambahan belanja modal pengadaan AC 1PK, belanja modal pengadaan videotron/TV home teater (di lobby depan), belanja modal pengadaan E-Notula (untuk memfasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD), belanja modal pengadaan laptop untuk DPRD periode 2024 – 2029, belanja modal pengadaan laptop untuk JDIH, belanja modal pengadaan printer untuk JDIH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai	9 Laporan	9 Laporan	1,824,742,125.00	1,969,862,125.00	145,120,000.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	32 Laporan	10,100,000.00	10,100,000.00	-	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Fisik		Target Keuangan		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	25 Laporan	325,800,000.00	445,800,000.00	120,000,000.00	Penambahan belanja tagihan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan	39 Laporan	1,488,842,125.00	1,513,962,125.00	25,120,000.00	Penambahan belanja retribusi kebersihan, dan belanja pembuatan company profile (video profil)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	7 Laporan	7 Laporan	2,722,534,000.00	3,055,034,000.00	332,500,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	365,370,000.00	365,370,000.00	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	588,698,000.00	588,698,000.00	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit	221,000,000.00	221,000,000.00	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1,547,466,000.00	1,879,966,000.00	332,500,000.00	Penambahan belanja pemeliharaan perbaikan / renovasi interior ruang fraksi PPP, belanja pemeliharaan ornamen ukiran jati, belanja pemeliharaan jasa konsultan perencanaan ruang fraksi PPP, belanja pemeliharaan jasa konsultan pengawasan ruang fraksi PPP, dan belanja modal pembuatan gazebo kayu jati minimalis
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD	40 Orang	40 Orang	21,991,577,000.00	21,989,327,000.00	- 2,250,000.00	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Fisik		Target Keuangan		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD							
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang / Bulan	40 Orang / Bulan	21,644,747,000.00	21,644,747,000.00	-	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD							
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	302,770,000.00	300,520,000.00	- 2,250,000.00	Pengurangan belanja percontohan pakaian dinas DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD							
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	40 Orang	44,060,000.00	44,060,000.00	-	
Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitas Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	238 Laporan	238 Laporan	1,267,624,250.00	1,482,724,250.00	215,100,000.00	
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD							
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	43,872,000.00	43,872,000.00	-	
Fasilitasi Fraksi DPRD							
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	120 Laporan	120 Laporan	455,292,000.00	455,292,000.00	-	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD							
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	31 Laporan	31 Laporan	482,720,250.00	482,720,250.00	-	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD							
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8 Paket	9 Paket	285,740,000.00	500,840,000.00	215,100,000.00	Penambahan belanja modal pengadaan rak server, belanja modal pengadaan mebelair meja kursi jati ruang lobby pimpinan sisi Selatan, belanja modal pengadaan mebelair meja kursi jati ruang podcast, belanja modal pengadaan mebelair meja kursi jati ruang lobby pimpinan sisi utara. Dan belanja modal pengadaan vacuum cleaner
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				36,037,391,750.00	36,927,870,250.00	890,478,500.00	
SEKRETARIAT DPRD				36,037,391,750.00	36,927,870,250.00	890,478,500.00	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Fisik		Target Keuangan		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	100%	100%	36,037,391,750.00	36,927,870,250.00	890,478,500.00	
	Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang Diselesaikan	100%	100%				
	Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan	100%	100%				
	Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan	100%	100%				
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap kehumasan dan publikasi Sekretariat DPRD dan DPRD	63.67%	75%				
	Persentase aspirasi masyarakat yang terfasilitasi	100%	100%				
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen produk hukum	50 Dokumen	50 Dokumen	8,195,252,000.00	8,324,582,000.00	129,330,000.00	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah							
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,565,982,000.00	1,565,982,000.00	-	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14 Dokumen	10 Dokumen	5,146,920,000.00	5,276,250,000.00	129,330,000.00	Penambahan belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja perjalanan dinas
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan							
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	10 Dokumen	963,600,000.00	963,600,000.00	-	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik							
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	5 Dokumen	518,750,000.00	518,750,000.00	-	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran	8 Dokumen	8 Dokumen	2,843,199,000.00	2,747,567,500.00	- 95,631,500.00	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Fisik		Target Keuangan		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembahasan KUA dan PPAS							
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	541,236,000.00	490,910,000.00	- 50,326,000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber, dan belanja bantuan transport (dialog warga, RDPU, uji publik)
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	407,177,000.00	398,852,000.00	- 8,325,000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber, dan belanja bantuan transport (dialog warga, RDPU, uji publik)
Pembahasan APBD							
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	836,196,000.00	836,196,000.00	-	
Pembahasan APBD Perubahan							
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	706,366,000.00	698,041,000.00	- 8,325,000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber, dan belanja bantuan transport (dialog warga, RDPU, uji publik)
Pembahasan Laporan Semester							
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	5,950,000.00	5,950,000.00	-	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD							
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	346,274,000.00	317,618,500.00	- 28,655,500.00	Pengurangan belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja bantuan transport (dialog warga, RDPU, uji publik)
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan; Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	214 Laporan	214 Laporan	7,129,193,000.00	7,088,993,000.00	- 40,200,000.00	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	1,235,661,500.00	1,235,661,500.00	-	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	1,141,107,500.00	1,141,107,500.00	-	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Fisik		Target Keuangan		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat							
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	1,141,107,500.00	1,141,107,500.00	-	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	1,141,107,500.00	1,141,107,500.00	-	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	27,450,000.00	2,400,000.00	- 25,050,000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja bantuan transport (dialog warga, RDPU, uji publik)
Pengawasan Penggunaan Anggaran							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	1,978,720,000.00	1,978,720,000.00	-	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah							
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	464,039,000.00	448,889,000.00	- 15,150,000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber, dan belanja bantuan transport (dialog warga, RDPU, uji publik)
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas; Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli; Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan; Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	283 Dokumen	283 Dokumen	7,458,213,000.00	8,521,213,000.00	1,063,000,000.00	
Orientasi DPRD							
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	223,520,000.00	223,520,000.00	-	
Pendalaman Tugas DPRD							
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	7 Dokumen	7 Dokumen	3,336,703,000.00	3,336,703,000.00	-	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli							
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	2 Orang	180,000,000.00	180,000,000.00	-	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi							
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang	216,000,000.00	216,000,000.00	-	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Fisik		Target Keuangan		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	443,768,000.00	455,768,000.00	12,000,000.00	Penambahan belanja makanan dan minuman jamuan tamu
Penyusunan Program Kerja DPRD							
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	2 Dokumen	452,614,000.00	452,614,000.00	-	
Publikasi dan Dokumentasi DPRD							
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	18 Dokumen	18 Dokumen	2,605,608,000.00	3,656,608,000.00	1,051,000,000.00	Penambahan belanja jasa iklan / reklame, film dan pemotretan (publikasi/sosialisasi rancangan produk hukum dan produk hukum di media cetak, belanja advertorial di media cetak, belanja publikasi kegiatan DPRD di media cetak, belanja mimbar alat kelengkapan, belanja dewan menyapa, belanja obrolan tugu jogja, belanja podcast DPRD, dan belanja publikasi videotron)
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	3,509,556,250.00	3,396,956,250.00	- 112,600,000.00	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD							
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	1,033,195,000.00	931,595,000.00	- 101,600,000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber (moderator), dan belanja bantuan transport (dialog warga, coffe morning)
Pelaksanaan Reses							
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2 Dokumen	2,476,361,250.00	2,465,361,250.00	- 11,000,000.00	Pengurangan belanja jasa iklan / reklame, film dan pemotretan (publikasi / pengumuman agenda Reses DPRD)
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD	13 Laporan	13 Laporan	688,540,000.00	653,240,000.00	- 35,300,000.00	
Penyusunan Kode Etik DPRD							
	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	334,965,000.00	330,465,000.00	- 4,500,000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Fisik		Target Keuangan		Selisih	Keterangan
		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengawasan Kode Etik DPRD							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPR	12 Laporan	12 Laporan	353,575,000.00	322,775,000.00	- 30,800,000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa narasumber, dan belanja bantuan transport (dialog warga, RDPU)
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama; Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	457,697,000.00	455,777,000.00	- 1,920,000.00	
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah							
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	356,817,000.00	354,897,000.00	- 1,920,000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi							
	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,880,000.00	100,880,000.00	-	
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota; Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan; Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	172 Dokumen	172 Dokumen	5,755,741,500.00	5,739,541,500.00	- 16,200,000.00	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	605,879,000.00	605,879,000.00	-	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD							
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	390,243,500.00	381,243,500.00	- 9,000,000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah							
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	2,449,770,000.00	2,449,770,000.00	-	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,309,849,000.00	2,302,649,000.00	- 7,200,000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat
J U M L A H				71,136,640,795.00	73,656,604,795.00	2,519,964,000.00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2024 nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga agenda kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.